

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bagir Manan, 2001, *I Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Firmansyah Arifin et.Al, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Konsorsium reformasi hokum Nasional (KRHN), Jakarta
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta : Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Mahmuddin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta : Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia,
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, 2000, *Ilmu Negara : Edisi Revisi*, Jakarta : Gaya Media Pratama
- Refly Harun, dkk, 2010, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Konstitusi Pers
- Soemantri Sri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-XV/2017

JURNAL

Sri Soemantri, 2004, *Eksistensi System Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Makalah Proseeding diskusi Publik, komisi Reformasi hukum Nasional (KRHN)

Rizky Argama, 2007, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu*, Depok : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia

INTERNET

Pradirwan, 2014, “*Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*”, diakses dari : <http://www.pradirwan.tk/2014/07/sejarah-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk.html>, diakses tahun 2014.